

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang perkara kosmetik ilegal. dan Apakah Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam Perkara Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Tungkal sudah sesuai dengan putusan hakim. Metode penelitiannya ialah empiris. Hasil penelitiannya yaitu Menurut peneliti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Ktl sudah tepat apabila terdakwa Mirna Wati Binti H. Harusa selaku pelaku usaha, dijatuhkan tuntutan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Apabila ditinjau kembali atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, antara terdakwa selaku pelaku usaha dengan masyarakat selaku konsumen saling memiliki keterkaitan. walaupun pada kenyataannya masa penjatuhan pidana dan denda yang diberikan jauh dari kata sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan karena kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh petugas BPOM dan adanya perbedaan seseorang dimata hukum (hanya terdakwa yang dilakukan penyidikan, padahal toko yang lain juga menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar), Dan Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak sependapat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh BPOM Provinsi Jambi terhadap terdakwa. Karena menurut Majelis Hakim, dalam struktur BBPOM Jambi terdapat seksi pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan tiap satu/dua kali dalam setahun, untuk memeriksa apakah ada peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam pasaran atau tidak. Apabila ditemukan, maka menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan adalah bersifat persuasif artinya diberikan pembinaan terlebih dahulu kepada para penjual/pelaku usaha dengan cara melakukan pemusnahan barang bukti di tempat ditemukannya barang, dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun apabila pembinaan telah dilakukan dan praktek penjualan terhadap kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut tetap berjalan maka tindakan kedua barulah ditempuh melalui jalur hukum

*Kata Kunci : Kosmetik Ilegal dan Pertimbangan Hakim*

## ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the legal considerations regarding the judge's decision regarding the illegal cosmetics case. And whether the study of the Kuala Tungkal District Court Decision Number 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl in the Illegal Cosmetics Case in Kuala Tungkal City is in accordance with judge's decision. The research method is empirical. The results of the research are: According to the researchers, what was considered by the Panel of Judges at the Kuala Tungkal District Court in decision number 125/Pid.Sus/2022/PN Ktl was correct if the defendant Mirna Wati Binti H. Harusa, as a business actor, was charged by the Public Prosecutor with an indictment as regulated in Article 197 in conjunction with Article 106 paragraph 1 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, if we review the mistakes committed by the defendant, the defendant as a business actor and the community as consumers are related to each other. even though in reality the period of criminal imposition and fines given are far from in accordance with the criminal threat in Article 197 of the Health Law due to the lack of supervision carried out by BPOM officers and the existence of differences in people in the eyes of the law (only the defendant is being investigated, even though other shops are also selling cosmetics that do not have a distribution permit), and however, in their consideration, the Panel of Judges at the Kuala Tungkal District Court did not agree with the actions taken by BPOM Jambi Province against the defendant. Because according to the Panel of Judges, in the structure of BBPOM Jambi there is an inspection section whose task is to carry out inspections and guidance once/twice a year, to check whether there is distribution of cosmetics that do not have a distribution permit on the market or not. If it is found, then according to the Panel of Judges the action taken is persuasive, meaning that guidance is given first to sellers/business actors by destroying evidence at the place where the goods are found, and making a statement that they will not repeat the action, but if guidance has been carried out and The practice of selling cosmetics that do not have a distribution permit continues, so the second step is to take legal action

Keywords: Illegal Cosmetics and Judges' Considerations